

Problematika dan kerumitan adiwiyata dalam usulan dan keberlanjutannya

Samsudin

*Ketua Asosiasi Pengembang Sekolah Adiwiyata Indonesia
Pembina Adiwiyata Kota Malang dan Batu*

KEBIJAKAN PROGRAM ADIWIYATA

Adiwiyata amanah UU 32 / 2009 tentang PPLH tindak lanjutnya Permeneg LH 02 / 2009 tentang pedoman Adiwiyata dan Permeneg ini belum dapat menjawab kendala bagi sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata belum dapat mengukur keberhasilannya, sistem penilaian belum transparan, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan terus menerus.

SINERGI UMM

Seminar Nasional ini berupaya mengurangi kendala dalam proses usulan calon sekolah adiwiyata dan mempertahankan keberlanjutan. Keikutsertaan Perguruan Tinggi yang memang sejak awal diharapkan sebagai stake-holder sekolah adiwiyata. Inisiatif Universitas Muhammadiyah Malang ikut membina Sekolah Adiwiyata di Jawa Timur merupakan kebijakan strategis bagi UMM dan Sekolah Mitra.

PROBLEMATIKA KKPS

Problematika usulan CSAK, CSAP, CSAN, dan CSAM terangkum dalam komponen Kebijakan, Kurikulum, Partisipatif, dan Sarpras. Berikut disajikan permasalahan itu.

1) Visi, misi, dan tujuan

Visi sekolah pada umumnya berwawasan lingkungan atau berbudaya lingkungan namun visi, misi, dan tujuan yang dalam pengembangan adiwiyata adalah Pelestarian Fungsi Lingkungan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Menurut sekolah makna Berbudaya Lingkungan lebih luas dan mendalam.

2) Internalisasi visi misi

Internalisasi yang bermakna "tahu dan paham visi, misi, dan tujuan" sesuatu yang tidak mudah, karena umumnya mereka

menganggap harus hafal. Sehingga bila juri menanyakan hal ini kebanyakan tidak sesuai harapan.

3) KTSP

Struktur Kurikulum yang ditampilkan dalam KTSP sangat generik dan tidak nampak integrasi PPLHnya, untuk itu diperlukan : "Catatan bahwa PPLH terintegrasi dalam mapel muatan A (nasional), B (wilayah, muatan lokal), C (Peminatan)

4) RKAS

Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) pada umumnya belum dikategorikan pembiayaan untuk PPLH. Misalnya anggaran kesiswaan masih perencanaan umum belum diperinci perencanaan PPLH bidang kesiswaan. Sehingga diperlukan contoh rincian kegiatan PPLH dalam kegiatan kesiswaan.

5) Kurikulum berbasis LH

Penilaian terhadap standar pendidik terlalu rendah dengan 7 Implementasi total nilai 10 dengan rentang (0,5 s.d. 2) Misal $\geq 70\%$ tenaga pendidik mengembangkan isu lokal (daerah) dan isu global yang terkait dengan PPLH. 40% - 50% nilai 0,5; 50%-70% nilai 1; $>70\%$ nilai 2 perlu ada peningkatan nilai.

6) Kurikulum berbasis LH

Menghadirkan nara sumber PPLH (orangtua, masyarakat) di kelas pada umumnya tidak mudah bagi guru, sehingga jika ditetapkan dengan prosentase yang cukup besar sulit bagi guru. SD sebesar $\geq 50\%$, SMP sebesar $\geq 40\%$, SMA/SMK sebesar $\geq 30\%$ (5 org).

7) Kurikulum berbasis LH

Kriteria nomor 7 dalam standar pendidik yang menyebutkan $\geq 70\%$ pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah LH, ini umumnya

sulit dilaksanakan oleh guru, maka perlu revisi.

8) Kurikulum berbasis LH: Standard peserta didik

Tantangan yang tidak mudah bagi guru dan Peserta Didik, khususnya yang SD, SMP dimana 10 % - <30 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah LH.

KEBERLANJUTAN ADIWIYATA

Meski akan menyulitkan sekolah, karena untuk sustainable (keberlanjutan)

maka penilaian kembali sekolah adiwiyata mandiri sangat perlu. Misal sertifikat berlaku 5 tahun.

Pengorbanan berdarah-darah: waktu, tenaga, pemikiran, biaya, untuk mewujudkan komunitas sekolah yang darling, kemudian berhasil dan diapresiasi dengan sertifikat semacam itu, perlu dievaluasi, sebelum semuanya ambyar